



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan Penyediaan Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan dan Permukiman maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

*Handwritten signature*

- 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97) pada Lampiran 1A, Lampiran II, dan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A, Lampiran II, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA,




*[Handwritten signature]*

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA,



*[Handwritten signature]*

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN IA  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 38 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 97 TAHUN  
 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	SELISIH	%	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	2.084.332.217.000	2.084.332.217.000	-	-	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266.840.260.000	266.840.260.000	-	-	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	50.680.000.000	50.680.000.000	-	-	
4.1.1.01	Pajak Hotel	350.000.000	350.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	40.000.000	40.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	70.114.000	70.114.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	17.068.000	17.068.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	216.366.000	216.366.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/Hostel/Rumah Kos	6.452.000	6.452.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.01	Restoran	875.000.000	875.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.02	Rumah Makan	105.350.000	105.350.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.05	Katering	2.399.650.000	2.399.650.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.06	Warung	120.000.000	120.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.815.000.000	2.815.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	45.000.000	45.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000	5.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2.750.000.000	2.750.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	15.000.000	15.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	700.000.000	700.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	629.000.000	629.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain	68.000.000	68.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	3.000.000	3.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.06.08	Pasir	743.500.000	743.500.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.06.10	Batu Pecah/Kerikil	556.500.000	556.500.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.07	Pajak Parkir	65.000.000	65.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011

1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	65.000.000	65.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	600.000.000	600.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	600.000.000	600.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.750.000.000	17.750.000.000	-	-	Perda Nomor 15 Tahun 2011
4.1.1.11.03	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - P2	17.750.000.000	17.750.000.000	-	-	Perda Nomor 15 Tahun 2011
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.600.000.000	3.600.000.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 2012
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	3.600.000.000	3.600.000.000	-	-	Perda Nomor 8 Tahun 2012 & Perda Nomor 16 Tahun 2010
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.883.473.000	12.883.473.000	-	-	Perda Nomor 3 Tahun 2010
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	6.025.000.000	6.025.000.000	-	-	Perda Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Pemsampahan/Kebersihan	310.200.000	310.200.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 2012
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar	3.014.800.000	3.014.800.000	-	-	Perda Nomor 3 Tahun 2010
4.1.2.01.45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000	700.000.000	-	-	Perda Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.073.379.000	5.073.379.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.366.205.000	2.366.205.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 2012
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.555.000.000	1.555.000.000	-	-	Perda Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	355.500.000	355.500.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	591.000.000	591.000.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 2005
4.1.2.02.31	Retribusi Terminal	129.024.000	129.024.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4.1.2.02.32	Retribusi Rumah Potong Hewan	76.650.000	76.650.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 2005
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.785.094.000	1.785.094.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.475.094.000	1.475.094.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 2005
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek	160.000.000	160.000.000	-	-	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4.1.2.03.12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	150.000.000	150.000.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 2005
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.239.141.000	21.239.141.000	-	-	Perda Nomor 5 Tahun 2004
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BJMD	21.239.141.000	21.239.141.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 1995
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Perda Nomor 5 Tahun 2004
4.1.3.01.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purbalingga	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Perda Nomor 4 Tahun 1995
4.1.3.01.04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPRS Buana Mitra Pervira	681.980.000	681.980.000	-	-	Perda Nomor 2 Tahun 2004
4.1.3.01.08	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD OWABONG	5.500.000.000	5.500.000.000	-	-	Perda Nomor 2 Tahun 2004
4.1.3.01.09	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng	6.500.000.000	6.500.000.000	-	-	Perda Nomor 2 Tahun 2004
4.1.3.01.10	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Perwira	2.557.161.000	2.557.161.000	-	-	Perda Nomor 2 Tahun 2004
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	182.037.646.000	182.037.646.000	-	-	Perda Nomor 2 Tahun 2004
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	280.000.000	280.000.000	-	-	Perda Nomor 2 Tahun 2004
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	280.000.000	280.000.000	-	-	Perda Nomor 2 Tahun 2004
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Perda Nomor 2 Tahun 2004

1	2	3	4	5	6	7
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.950.000.000	2.950.000.000	-	-	-
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas / Bendahara	50.000.000	50.000.000	-	-	-
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	12.000.000.000	12.000.000.000	-	-	-
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank Jateng	12.000.000.000	12.000.000.000	-	-	-
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	538.000.000	538.000.000	-	-	-
4.1.4.10.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Lalu	538.000.000	538.000.000	-	-	-
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	24.000.000	24.000.000	-	-	-
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial	24.000.000	24.000.000	-	-	-
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	165.709.646.000	165.709.646.000	-	-	-
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	118.389.080.000	118.389.080.000	-	-	-
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	572.000.000	572.000.000	-	-	-
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	46.748.566.000	46.748.566.000	-	-	-
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	486.000.000	486.000.000	-	-	-
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	486.000.000	486.000.000	-	-	-
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.306.322.689.000	1.306.322.689.000	-	-	-
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.342.179.000	26.342.179.000	-	-	-
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	24.096.274.000	24.096.274.000	-	-	-
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.730.271.000	6.730.271.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	10.491.587.000	10.491.587.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.874.416.000	6.874.416.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.245.905.000	2.245.905.000	-	-	-
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	258.578.000	258.578.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	983.593.000	983.593.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	936.340.000	936.340.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	67.198.000	67.198.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	196.000	196.000	-	-	-
4.2.2	Dana Alokasi Umum	918.228.685.000	918.228.685.000	-	-	-
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	918.228.685.000	918.228.685.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	912.934.570.000	912.934.570.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.2.01.02	Dana Alokasi Umum Tambahan	5.294.115.000	5.294.115.000	-	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	361.751.825.000	361.751.825.000	-	-	-
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	135.179.432.000	135.179.432.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	49.866.758.000	49.866.758.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	30.988.076.000	30.988.076.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	18.344.641.000	18.344.641.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	3.954.340.000	3.954.340.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	768.920.000	768.920.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	4.008.419.000	4.008.419.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	808.817.000	808.817.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.535.750.000	2.535.750.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018



1	2	3	4	5	6	7
4.2.3.01.29	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	14.801.175.000	14.801.175.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.30	DAK Bidang Pasar	2.763.310.000	2.763.310.000	-	-	
4.2.3.01.31	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Penugasan)	4.492.138.000	4.492.138.000	-	-	
4.2.3.01.32	DAK Bidang Pariwisata	1.847.088.000	1.847.088.000	-	-	
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	226.572.393.000	226.572.393.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	11.030.400.000	11.030.400.000	-	-	
4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru	181.135.782.000	181.135.782.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru	368.513.000	368.513.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	24.104.534.000	24.104.534.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.02.08	Bantuan Operasional KB	5.293.395.000	5.293.395.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.02.09	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.194.069.000	2.194.069.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.02.10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.995.700.000	1.995.700.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.2.3.02.11	Penyelenggaraan Museum	450.000.000	450.000.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	511.169.268.000	511.169.268.000	-	-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	90.652.400.000	90.652.400.000	-	-	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	3.600.000.000	3.600.000.000	-	-	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	3.600.000.000	3.600.000.000	-	-	
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	87.052.400.000	87.052.400.000	-	-	
4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS SD Negeri	56.650.400.000	56.650.400.000	-	-	
4.3.1.06.02	Hibah Dana BOS SMP Negeri	30.402.000.000	30.402.000.000	-	-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnva	112.992.776.000	112.992.776.000	-	-	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	112.992.776.000	112.992.776.000	-	-	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	22.355.624.000	22.355.624.000	-	-	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.773.171.000	23.773.171.000	-	-	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.548.100.000	31.548.100.000	-	-	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	23.054.000	23.054.000	-	-	
4.3.3.01.10	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	35.292.827.000	35.292.827.000	-	-	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43.832.487.000	43.832.487.000	-	-	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	43.832.487.000	43.832.487.000	-	-	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	43.832.487.000	43.832.487.000	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.3.4.01.10	Dana Desa	-	-	-	-	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnva	26.470.000.000	26.470.000.000	-	-	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	26.470.000.000	26.470.000.000	-	-	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	26.470.000.000	26.470.000.000	-	-	
4.3.6	Pendapatan Lainnya	237.221.605.000	237.221.605.000	-	-	
4.3.6.02	Dana Desa	237.221.605.000	237.221.605.000	-	-	
4.3.6.02.01	Dana Desa	237.221.605.000	237.221.605.000	-	-	
5	BELANJA	2.129.400.456.000	2.129.400.456.000	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.227.638.496.000	1.227.638.496.000	-	-	-
5.1.1	Belanja Pegawai	820.084.497.000	820.084.497.000	-	-	-
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	710.964.804.000	710.964.804.000	-	-	-
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	406.707.236.000	406.707.236.000	-	-	-
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	37.037.367.000	37.037.367.000	-	-	-
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.599.035.000	8.599.035.000	-	-	-
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	26.487.074.000	26.487.074.000	-	-	-
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.348.060.000	5.348.060.000	-	-	-
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	18.591.483.000	18.591.483.000	-	-	-
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.439.334.000	1.439.334.000	-	-	-
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.074.000	6.074.000	-	-	-
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	11.242.303.000	11.242.303.000	-	-	-
5.1.1.01.10	Uang Paket	86.058.000	86.058.000	-	-	-
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	28.319.000	28.319.000	-	-	-
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	55.907.000	55.907.000	-	-	-
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	28.319.000	28.319.000	-	-	-
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.857.000	7.857.000	-	-	-
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	37.058.000	37.058.000	-	-	-
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.920.000.000	4.920.000.000	-	-	-
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	430.290.000	430.290.000	-	-	-
5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kematian	2.460.514.000	2.460.514.000	-	-	-
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	821.221.000	821.221.000	-	-	-
5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru PNSD	181.135.782.000	181.135.782.000	-	-	-
5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi	368.513.000	368.513.000	-	-	-
5.1.1.01.25	Tunjangan Reses	945.000.000	945.000.000	-	-	-
5.1.1.01.26	Tunjangan Transportasi	4.182.000.000	4.182.000.000	-	-	-
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	99.473.001.000	99.473.001.000	-	-	-
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	98.722.051.000	98.722.051.000	-	-	-
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	110.200.000	110.200.000	-	-	-
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	640.750.000	640.750.000	-	-	-
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000	6.522.000.000	-	-	-
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000	5.670.000.000	-	-	-
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	-	-	-
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000	252.000.000	-	-	-
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.534.000.000	2.534.000.000	-	-	-
5.1.1.05.18	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.534.000.000	2.534.000.000	-	-	-
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	590.692.000	590.692.000	-	-	-
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	590.692.000	590.692.000	-	-	-
5.1.1.3	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	-	-	-
5.1.1.3.02	Belanja Subsidi Bunga	500.000.000	500.000.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.1.3.02.01	Belanja Subsidi Bunga kepada UMKM	500.000.000	500.000.000	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	23.911.200.000	23.911.200.000	-	-	-
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	243.200.000	243.200.000	-	-	-
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	243.200.000	243.200.000	-	-	-
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	10.912.500.000	10.912.500.000	-	-	-
5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	2.432.500.000	2.432.500.000	-	-	-
5.1.4.05.11	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pendidikan	4.680.000.000	4.680.000.000	-	-	-
5.1.4.05.21	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	25.000.000	25.000.000	-	-	-
5.1.4.05.23	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Sosial	855.000.000	855.000.000	-	-	-
5.1.4.05.25	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Koperasi dan UMKM	30.000.000	30.000.000	-	-	-
5.1.4.05.28	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemuda dan Olah Raga	2.515.000.000	2.515.000.000	-	-	-
5.1.4.05.30	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Otda & Pem Umum	275.000.000	275.000.000	-	-	-
5.1.4.05.36	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pertanian	100.000.000	100.000.000	-	-	-
5.1.4.09	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	10.759.800.000	10.759.800.000	-	-	-
5.1.4.09.01	Belanja Hibah BOP PAUD Swasta	10.759.800.000	10.759.800.000	-	-	-
5.1.4.10	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.995.700.000	1.995.700.000	-	-	-
5.1.4.10.01	Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	1.995.700.000	1.995.700.000	-	-	-
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.113.500.000	27.113.500.000	-	-	-
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.400.000.000	2.400.000.000	-	-	-
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan PAMSIMAS	1.980.000.000	1.980.000.000	-	-	-
5.1.5.01.07	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda	420.000.000	420.000.000	-	-	-
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	24.713.500.000	24.713.500.000	-	-	-
5.1.5.03.03	Belanja Beasiswa Kurang Mampu	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-
5.1.5.03.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.778.500.000	1.778.500.000	-	-	-
5.1.5.03.06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-
5.1.5.03.09	Belanja Bantuan Sosial kepada PPCI	20.000.000	20.000.000	-	-	-
5.1.5.03.10	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin	18.000.000.000	18.000.000.000	-	-	-
5.1.5.03.11	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)	-	2.415.000.000	2.415.000.000	-	-
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.645.949.000	6.645.949.000	-	-	-
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.107.254.000	5.107.254.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.107.254.000	5.107.254.000	-	-	-
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.538.695.000	1.538.695.000	-	-	-
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.538.695.000	1.538.695.000	-	-	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	347.878.586.000	347.878.586.000	-	-	-
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	346.572.922.000	346.572.922.000	-	-	-
5.1.7.03.01	Alokasi Dana Desa (ADD)	96.584.817.000	96.584.817.000	-	-	-
5.1.7.03.03	Bantuan kepada Mantan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Peranokat Desa	771.500.000	771.500.000	-	-	-
5.1.7.03.04	Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa	11.995.000.000	11.995.000.000	-	-	-
5.1.7.03.12	Dana Desa	237.221.605.000	237.221.605.000	-	-	-
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	100.000.000	100.000.000	-	-	-
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	-	-	-
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.205.664.000	1.205.664.000	-	-	-
5.1.7.05.01	Partai Nasdem	54.030.000	54.030.000	-	-	-
5.1.7.05.02	Partai Kebangkitan Bangsa	136.687.000	136.687.000	-	-	-
5.1.7.05.03	Partai Keadilan Sejahtera	93.520.000	93.520.000	-	-	-
5.1.7.05.04	PDI Perjuangan	289.342.000	289.342.000	-	-	-
5.1.7.05.05	Partai Golkar	181.219.000	181.219.000	-	-	-
5.1.7.05.06	Partai Gerindra	166.685.000	166.685.000	-	-	-
5.1.7.05.07	Partai Demokrat	80.360.000	80.360.000	-	-	-
5.1.7.05.08	Partai Amanat Nasional	81.688.000	81.688.000	-	-	-
5.1.7.05.09	Partai Persatuan Pembangunan	68.833.000	68.833.000	-	-	-
5.1.7.05.10	Partai Hanura	53.300.000	53.300.000	-	-	-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.504.764.000	1.504.764.000	-	-	-
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.504.764.000	1.504.764.000	-	-	-
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.504.764.000	1.504.764.000	-	-	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	904.176.960.000	901.761.960.000	(2.415.000.000)	(0,00)	-
5.2.1	Belanja Pegawai	56.179.181.000	56.214.281.000	35.100.000	0,00	-
5.2.1.01	Honorarium PNS	19.830.366.000	19.865.466.000	35.100.000	0,00	-
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.868.366.000	15.903.466.000	35.100.000	0,00	-
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	449.600.000	449.600.000	-	-	-
5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	138.775.000	138.775.000	-	-	-
5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	3.373.625.000	3.373.625.000	-	-	-
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.089.150.000	11.089.150.000	-	-	-
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.992.100.000	10.992.100.000	-	-	-
5.2.1.02.03	Upah Harian	97.050.000	97.050.000	-	-	-
5.2.1.03	Uang Lembur	995.219.000	995.219.000	-	-	-
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	665.347.000	665.347.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	329.872.000	329.872.000	-	-	-
5.2.1.04	Belanja Pegawai Dana BOS	13.742.397.000	13.742.397.000	-	-	-
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai pada Dana BOS	13.742.397.000	13.742.397.000	-	-	-
5.2.1.07	Belanja Pegawai - Dana BLUD	10.522.049.000	10.522.049.000	-	-	-
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai - Dana BLUD	10.522.049.000	10.522.049.000	-	-	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	548.540.728.000	546.090.628.000	(2.450.100.000)	(0,00)	-
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.683.692.000	14.686.966.000	3.274.000	0,00	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.306.820.000	5.310.094.000	3.274.000	0,00	-
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerina)	1.352.753.000	1.352.753.000	-	-	-
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	349.875.000	349.875.000	-	-	-
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	605.370.000	605.370.000	-	-	-
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.418.532.000	1.418.532.000	-	-	-
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	28.765.000	28.765.000	-	-	-
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	96.054.000	96.054.000	-	-	-
5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	338.915.000	338.915.000	-	-	-
5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	628.469.000	628.469.000	-	-	-
5.2.2.01.11	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.340.000.000	2.340.000.000	-	-	-
5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.359.724.000	1.359.724.000	-	-	-
5.2.2.01.13	Belanja cenderamata / karangan bunga / plakat	451.175.000	451.175.000	-	-	-
5.2.2.01.14	Belanja Alat Peraga/praktek Sekolah	407.240.000	407.240.000	-	-	-
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.503.208.000	29.503.208.000	-	-	-
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.992.869.000	5.992.869.000	-	-	-
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	381.825.000	381.825.000	-	-	-
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.246.555.000	8.246.555.000	-	-	-
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	422.220.000	422.220.000	-	-	-
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	736.547.000	736.547.000	-	-	-
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	3.074.595.000	3.074.595.000	-	-	-
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan	99.050.000	99.050.000	-	-	-
5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	395.990.000	395.990.000	-	-	-
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Bibit Ikan	137.750.000	137.750.000	-	-	-
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	6.137.753.000	6.137.753.000	-	-	-
5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	3.623.620.000	3.623.620.000	-	-	-
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Laboratorium	254.434.000	254.434.000	-	-	-
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92.125.450.000	92.125.450.000	-	-	-
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	646.570.000	646.570.000	-	-	-
5.2.2.03.02	Belanja Air	668.290.000	668.290.000	-	-	-
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.505.153.000	14.505.153.000	-	-	-
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	45.000.000	45.000.000	-	-	-
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	325.009.000	325.009.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.804.286.000	1.804.286.000	-	-	-
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	17.590.000	17.590.000	-	-	-
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	184.875.000	184.875.000	-	-	-
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	6.146.708.000	6.146.708.000	-	-	-
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.521.102.000	10.521.102.000	-	-	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	180.755.000	180.755.000	-	-	-
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	195.845.000	195.845.000	-	-	-
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.341.099.000	2.341.099.000	-	-	-
5.2.2.03.17	Belanja Pengobatan Pasien Tidak Mampu	16.839.456.000	16.839.456.000	-	-	-
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	428.250.000	428.250.000	-	-	-
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	451.733.000	451.733.000	-	-	-
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	903.400.000	903.400.000	-	-	-
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	1.763.725.000	1.763.725.000	-	-	-
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.395.020.000	1.395.020.000	-	-	-
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.383.050.000	4.383.050.000	-	-	-
5.2.2.03.26	Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum	2.391.520.000	2.391.520.000	-	-	-
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Pengemudi	382.200.000	382.200.000	-	-	-
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Operator	5.734.060.000	5.734.060.000	-	-	-
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Pemungut Pendapatan	66.000.000	66.000.000	-	-	-
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.111.450.000	15.111.450.000	-	-	-
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Tenaga Sosial / Pelayanan	4.632.100.000	4.632.100.000	-	-	-
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Medis	61.204.000	61.204.000	-	-	-
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	926.337.000	926.337.000	-	-	-
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	50.440.000	50.440.000	-	-	-
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	866.272.000	866.272.000	-	-	-
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	9.625.000	9.625.000	-	-	-
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.294.098.000	11.294.098.000	-	-	-
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	936.627.000	936.627.000	-	-	-
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.115.161.000	2.115.161.000	-	-	-
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.656.242.000	7.656.242.000	-	-	-
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	12.500.000	12.500.000	-	-	-
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	313.234.000	313.234.000	-	-	-
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	260.334.000	260.334.000	-	-	-
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.460.740.000	7.462.491.000	1.751.000	0,00	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.870.315.000	4.870.315.000	-	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.590.425.000	2.592.176.000	1.751.000	0,00	-
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	894.745.000	894.745.000	-	-	-
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	683.245.000	683.245.000	-	-	-
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	205.000.000	205.000.000	-	-	-
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Tanah	6.500.000	6.500.000	-	-	-
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.406.130.000	1.406.130.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.406.130.000	1.406.130.000	-	-	-
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	78.000.000	78.000.000	-	-	-
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	39.000.000	39.000.000	-	-	-
5.2.2.09.05	Belanja Sewa Eskavator	39.000.000	39.000.000	-	-	-
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.385.206.000	3.385.206.000	-	-	-
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	438.635.000	438.635.000	-	-	-
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	35.000.000	35.000.000	-	-	-
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	115.200.000	115.200.000	-	-	-
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.099.005.000	1.099.005.000	-	-	-
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	176.900.000	176.900.000	-	-	-
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	742.000.000	742.000.000	-	-	-
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Praktek	1.346.000	1.346.000	-	-	-
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	290.596.000	290.596.000	-	-	-
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	486.524.000	486.524.000	-	-	-
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.112.508.000	28.133.133.000	20.625.000	0,00	-
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.050.000	4.050.000	-	-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.946.627.000	19.967.252.000	20.625.000	0,00	-
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.841.831.000	5.841.831.000	-	-	-
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	33.875.000	33.875.000	-	-	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Harian	2.203.625.000	2.203.625.000	-	-	-
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	82.500.000	82.500.000	-	-	-
5.2.2.12	Belanja Makanan dan Atributnya	743.977.000	743.977.000	-	-	-
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	58.000.000	58.000.000	-	-	-
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	67.500.000	67.500.000	-	-	-
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	144.000.000	144.000.000	-	-	-
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	429.477.000	429.477.000	-	-	-
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45.000.000	45.000.000	-	-	-
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.122.851.000	1.122.851.000	-	-	-
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.122.851.000	1.122.851.000	-	-	-
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.721.805.000	1.721.805.000	-	-	-
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	19.900.000	19.900.000	-	-	-
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	263.750.000	263.750.000	-	-	-
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	515.420.000	515.420.000	-	-	-
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Khusus	451.890.000	451.890.000	-	-	-
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	470.845.000	470.845.000	-	-	-
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.457.270.000	54.457.270.000	-	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.523.965.000	23.523.965.000	-	-	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.865.881.000	30.865.881.000	-	-	-
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	67.424.000	67.424.000	-	-	-
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	270.000.000	270.000.000	-	-	-
5.2.2.16.05	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S2	130.000.000	130.000.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.16.06	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S1	100.000.000	100.000.000	-	-	-
5.2.2.16.07	Belanja Beasiswa Kejar Paket	40.000.000	40.000.000	-	-	-
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.475.432.000	4.475.432.000	-	-	-
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.603.746.000	2.603.746.000	-	-	-
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.502.904.000	1.502.904.000	-	-	-
5.2.2.17.04	Belanja Ujian Dinas dan Seleksi Diklat	368.782.000	368.782.000	-	-	-
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.338.765.000	75.338.765.000	-	-	-
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	42.804.294.000	42.804.294.000	-	-	-
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	3.506.710.000	3.506.710.000	-	-	-
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.750.000	78.750.000	-	-	-
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.724.410.000	14.724.410.000	-	-	-
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	10.000.000	-	-	-
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	313.912.000	313.912.000	-	-	-
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.148.252.000	1.148.252.000	-	-	-
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	73.860.000	73.860.000	-	-	-
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	7.800.000	7.800.000	-	-	-
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	13.000.000	13.000.000	-	-	-
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	15.000.000	15.000.000	-	-	-
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	112.615.000	112.615.000	-	-	-
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Jaringan	99.546.000	99.546.000	-	-	-
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	795.357.000	795.357.000	-	-	-
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Benda-benda Kesenian/Kebudayaan	272.704.000	272.704.000	-	-	-
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	357.340.000	357.340.000	-	-	-
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	51.327.000	51.327.000	-	-	-
5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Drainase	1.761.506.000	1.761.506.000	-	-	-
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Mesin Industri	22.000.000	22.000.000	-	-	-
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	8.799.782.000	8.799.782.000	-	-	-
5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Trotoar	345.600.000	345.600.000	-	-	-
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan SIM	25.000.000	25.000.000	-	-	-
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.280.098.000	3.280.098.000	-	-	-
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.254.821.000	2.254.821.000	-	-	-
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.025.277.000	1.025.277.000	-	-	-
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	61.453.355.000	61.453.355.000	-	-	-
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	61.453.355.000	61.453.355.000	-	-	-
5.2.2.23	Belanja Hibah Barang atau Jasa	6.258.957.000	6.258.957.000	-	-	-
5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masvarakat	6.258.957.000	6.258.957.000	-	-	-
5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.490.450.000	4.550.450.000	60.000.000	0,01	-
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.490.450.000	4.550.450.000	60.000.000	0,01	-
5.2.2.27	Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa	3.305.335.000	769.585.000	(2.535.750.000)	(3,29)	-



1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	3.305.335.000	769.585.000	(2.535.750.000)	(3,29)	
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang dan Jasa - Dana BLUD	138.744.243.000	138.744.243.000	-	-	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang dan Jasa - Dana BLUD	138.744.243.000	138.744.243.000	-	-	
5 . 2 . 2 . 29	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.008.076.000	3.008.076.000	-	-	
5 . 2 . 2 . 29 . 02	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.008.076.000	3.008.076.000	-	-	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	299.457.051.000	299.457.051.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.274.000.000	1.274.000.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan	1.274.000.000	1.274.000.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 13	Tempat Kerja/Jasa	7.775.388.000	7.775.388.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.621.000.000	1.621.000.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barano	6.154.388.000	6.154.388.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 14	Jalan	3.534.286.000	3.534.286.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.250.000.000	2.250.000.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	388.061.000	388.061.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pencanokak	889.225.000	889.225.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	7.000.000	7.000.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	35.600.000	35.600.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	3.300.000	3.300.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	30.000.000	30.000.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	500.000	500.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	1.800.000	1.800.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.806.088.000	8.806.088.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.885.000.000	5.885.000.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.635.833.000	1.635.833.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.285.255.000	1.285.255.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	453.692.000	453.692.000	-	-	
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	391.892.000	391.892.000	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	61.800.000	61.800.000	-	-	-
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	881.011.000	881.011.000	-	-	-
5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	852.021.000	852.021.000	-	-	-
5.2.3.22.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	1.550.000	1.550.000	-	-	-
5.2.3.22.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	27.440.000	27.440.000	-	-	-
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	191.072.000	191.072.000	-	-	-
5.2.3.23.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.000.000	1.000.000	-	-	-
5.2.3.23.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pendaanakat	11.000.000	11.000.000	-	-	-
5.2.3.23.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	35.499.000	35.499.000	-	-	-
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kenia	143.573.000	143.573.000	-	-	-
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.198.624.000	1.198.624.000	-	-	-
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	55.458.000	55.458.000	-	-	-
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembandino	50.025.000	50.025.000	-	-	-
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	18.345.000	18.345.000	-	-	-
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Bilora	520.473.000	520.473.000	-	-	-
5.2.3.24.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	554.323.000	554.323.000	-	-	-
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	10.500.000	10.500.000	-	-	-
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	500.000	500.000	-	-	-
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	10.000.000	10.000.000	-	-	-
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	95.868.000	95.868.000	-	-	-
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000	3.000.000	-	-	-
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	73.918.000	73.918.000	-	-	-
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	18.950.000	18.950.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.434.379.000	6.434.379.000	-	-	-
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	7.000.000	7.000.000	-	-	-
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	6.100.000	6.100.000	-	-	-
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pencetakan)	8.000.000	8.000.000	-	-	-
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	1.657.708.000	1.657.708.000	-	-	-
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.755.571.000	4.755.571.000	-	-	-
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.694.939.000	6.694.939.000	-	-	-
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.213.035.000	4.213.035.000	-	-	-
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	246.984.000	246.984.000	-	-	-
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	580.779.000	580.779.000	-	-	-
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	102.781.000	102.781.000	-	-	-
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.378.050.000	1.378.050.000	-	-	-
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	173.310.000	173.310.000	-	-	-
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.905.942.000	8.905.942.000	-	-	-
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	432.520.000	432.520.000	-	-	-
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.781.701.000	6.781.701.000	-	-	-
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000	7.000.000	-	-	-
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.158.269.000	1.158.269.000	-	-	-
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	526.452.000	526.452.000	-	-	-
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Peiabat	74.000.000	74.000.000	-	-	-
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Peiabat	950.000	950.000	-	-	-
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Peiabat	36.550.000	36.550.000	-	-	-
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Peiabat	5.000.000	5.000.000	-	-	-
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Peiabat	31.500.000	31.500.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.016.007.000	1.016.007.000	-	-	-
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	920.062.000	920.062.000	-	-	-
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	76.445.000	76.445.000	-	-	-
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	3.000.000	3.000.000	-	-	-
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	16.500.000	16.500.000	-	-	-
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	136.580.000	136.580.000	-	-	-
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	133.580.000	133.580.000	-	-	-
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	3.000.000	3.000.000	-	-	-
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	25.613.684.000	25.613.684.000	-	-	-
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.451.373.000	3.451.373.000	-	-	-
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	1.281.956.000	1.281.956.000	-	-	-
5.2.3.34.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluaran Berencana	1.600.000	1.600.000	-	-	-
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	515.750.000	515.750.000	-	-	-
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	500.000	500.000	-	-	-
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	885.480.000	885.480.000	-	-	-
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.545.877.000	1.545.877.000	-	-	-
5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	747.265.000	747.265.000	-	-	-
5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	87.500.000	87.500.000	-	-	-
5.2.3.34.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	13.750.000	13.750.000	-	-	-
5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	515.700.000	515.700.000	-	-	-
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	11.020.000.000	11.020.000.000	-	-	-
5.2.3.34.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.546.933.000	3.546.933.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	46.150.000	46.150.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	33.750.000	33.750.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.400.000	3.400.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	9.000.000	9.000.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.339.377.000	2.339.377.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	647.250.000	647.250.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	3.400.000	3.400.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	19.850.000	19.850.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	8.000.000	8.000.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	130.000.000	130.000.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	38.800.000	38.800.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	5.000.000	5.000.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	8.000.000	8.000.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 36 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Penyelesaian	1.479.077.000	1.479.077.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	912.066.000	912.066.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	54.475.000	54.475.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	209.463.000	209.463.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	23.850.000	23.850.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	4.050.000	4.050.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	116.250.000	116.250.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	1.500.000	1.500.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	381.800.000	381.800.000	-	-	-
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	82.673.000	82.673.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	38.005.000	38.005.000	-	-	-
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lindukungan Hidup	1.098.934.000	1.098.934.000	-	-	-
5.2.3.42.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	2.200.000	2.200.000	-	-	-
5.2.3.42.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lindukungan	1.092.234.000	1.092.234.000	-	-	-
5.2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penuniano	4.500.000	4.500.000	-	-	-
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	164.789.000	164.789.000	-	-	-
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	136.789.000	136.789.000	-	-	-
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	28.000.000	28.000.000	-	-	-
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	131.423.029.000	131.423.029.000	-	-	-
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	15.968.048.000	15.968.048.000	-	-	-
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudana	224.525.000	224.525.000	-	-	-
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	27.509.913.000	27.509.913.000	-	-	-
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	9.000.000.000	9.000.000.000	-	-	-
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.325.000	200.325.000	-	-	-
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.983.813.000	37.983.813.000	-	-	-
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	17.000.000.000	17.000.000.000	-	-	-
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.233.810.000	4.233.810.000	-	-	-
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	122.631.000	122.631.000	-	-	-
5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	15.910.525.000	15.910.525.000	-	-	-
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	99.000.000	99.000.000	-	-	-
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.170.439.000	3.170.439.000	-	-	-
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tuu Peringatan	3.500.000	3.500.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tuju Perincatan Lainnya	3.500.000	3.500.000	-	-	-
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	250.000.000	250.000.000	-	-	-
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	250.000.000	250.000.000	-	-	-
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.225.500.000	1.225.500.000	-	-	-
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	750.000.000	750.000.000	-	-	-
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	475.500.000	475.500.000	-	-	-
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	54.521.215.000	54.521.215.000	-	-	-
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	54.521.215.000	54.521.215.000	-	-	-
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.951.314.000	5.951.314.000	-	-	-
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	5.936.000.000	5.936.000.000	-	-	-
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	15.314.000	15.314.000	-	-	-
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2.289.009.000	2.289.009.000	-	-	-
5.2.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	150.000.000	150.000.000	-	-	-
5.2.3.65.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	2.081.534.000	2.081.534.000	-	-	-
5.2.3.65.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	57.475.000	57.475.000	-	-	-
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Banunan Air Bersih/Baku	5.250.000	5.250.000	-	-	-
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.250.000	5.250.000	-	-	-
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	92.732.000	92.732.000	-	-	-
5.2.3.69.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	50.000.000	50.000.000	-	-	-
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	42.732.000	42.732.000	-	-	-
5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	6.804.751.000	6.804.751.000	-	-	-
5.2.3.71.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	255.089.000	255.089.000	-	-	-

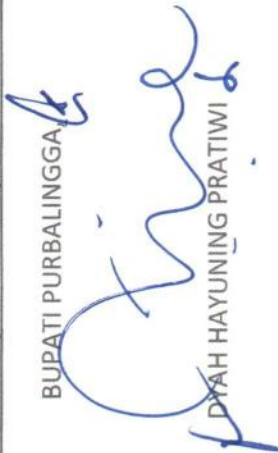
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.71.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	6.549.662.000	6.549.662.000	-	-	-
5.2.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Penanaman	3.000.000	3.000.000	-	-	-
5.2.3.77.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	3.000.000	3.000.000	-	-	-
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	7.933.500.000	7.933.500.000	-	-	-
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	5.500.000	5.500.000	-	-	-
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	7.928.000.000	7.928.000.000	-	-	-
5.2.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	15.000.000	15.000.000	-	-	-
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	15.000.000	15.000.000	-	-	-
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	8.847.285.000	8.847.285.000	-	-	-
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	8.847.285.000	8.847.285.000	-	-	-
5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perustakaan	29.780.000	29.780.000	-	-	-
5.2.3.84.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perustakaan Peta	14.780.000	14.780.000	-	-	-
5.2.3.84.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	15.000.000	15.000.000	-	-	-
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.646.743.000	1.646.743.000	-	-	-
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	1.136.023.000	1.136.023.000	-	-	-
5.2.3.85.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	510.720.000	510.720.000	-	-	-
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	431.835.000	431.835.000	-	-	-
5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	4.050.000	4.050.000	-	-	-
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	427.785.000	427.785.000	-	-	-
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	5.950.000	5.950.000	-	-	-
5.2.3.88.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	5.950.000	5.950.000	-	-	-
5.2.3.97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS	78.950.000	78.950.000	-	-	-
5.2.3.97.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS	78.950.000	78.950.000	-	-	-
5.2.3.99	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Dana BOS	2.200.000	2.200.000	-	-	-
5.2.3.99.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Dana BOS	2.200.000	2.200.000	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS	203.532.000	203.532.000	-	-	-
5.2.3.00.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS SURPLUS / (DEFISIT)	203.532.000	203.532.000	-	-	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(45.068.239.000)	(45.068.239.000)	-	-	-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	53.154.239.000	53.154.239.000	-	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.154.239.000	53.154.239.000	-	-	-
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	53.154.239.000	53.154.239.000	-	-	-
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	38.321.096.000	38.321.096.000	-	-	-
6.1.1.04.04	Belanja Modal	4.833.143.000	4.833.143.000	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.086.000.000	8.086.000.000	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.086.000.000	8.086.000.000	-	-	-
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.086.000.000	8.086.000.000	-	-	-
6.2.2.02.05	PDAM	3.600.000.000	3.600.000.000	-	-	-
6.2.2.02.06	PT Bank Jateng	2.486.000.000	2.486.000.000	-	-	-
6.2.2.02.08	PD Owabong	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-
6.2.2.02.10	PD BPR Artha Perwira	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	45.068.239.000	45.068.239.000	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-

Perda Nomor 5 Tahun 2015  
Perda Nomor 5 Tahun 2015  
Perda Nomor 5 Tahun 2015  
Perda Nomor 5 Tahun 2015

BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal **2 Mei 2019**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR **38**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 38 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 PENJABARAN PERGESERAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING 1	URAIAN 2	SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN 7
				(Rp.) 5	% 6	
Urusan Pemerintahan	: 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Organisasi	: 1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman					
Sub Unit Organisasi	: 1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Permukiman					
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5	BELANJA					
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG					
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan					
1.04 . 1.04.01 . 15.04	Penyediaan Perumahan Swadaya (DAK)	2.535.750.000,00	120.750.000,00	(2.415.000.000,00)	(95,24)	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.535.750.000,00	85.650.000,00	(2.450.100.000,00)	(96,62)	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.274.000,00	3.274.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.274.000,00	3.274.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.01.15.04.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.04.1.04.01.15.04.5.2.2.27	Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa	2.535.750.000,00	0,00	(2.535.750.000,00)	(100,00)	
1.04.1.04.01.15.04.5.2.2.27.01	Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	2.535.750.000,00	0,00	(2.535.750.000,00)	(100,00)	
Urusan Pemerintahan	: 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan					
Organisasi	: 4.04.01 Badan Keuangan Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 4.03.01.02 Badan Keuangan Daerah (PPKD)					
4.04.4.04.01.00.00.5	BELANJA					
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.5.03.11	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)	0,00	2.415.000.000,00	2.415.000.000,00	0,00	

BUPATI PURBALINGGA,   
DYAH HAYUNING PRATIWI d.

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR **38** TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		2.400.000.000	2.400.000.000	-	-
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Pamsimas		1.980.000.000	1.980.000.000	-	-
1	1 Sharing Pamsimas Regulaer	Purbalingga	980.000.000	980.000.000	-	-
2	2 Stimulan sambungan rumah	Purbalingga	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
5.1.5.01.07	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda		420.000.000	420.000.000	-	-
1	1 Panti Asuhan Mandanasiwi Penambongan	Jl. Wiramengala Kel. Penambongan Purbalingga	20.000.000	20.000.000	-	-
2	2 Panti Asuhan Daarul Istiqomah Babakan	Desa Babakan Kec. Kalimanah	20.000.000	20.000.000	-	-
3	3 Panti Asuhan Muhammadiyah Bukateja	Desa Bukateja Kec. Bukateja	20.000.000	20.000.000	-	-
4	4 Panti Asuhan Nadhief Senon	Desa Senon Kec. Kemangkon	20.000.000	20.000.000	-	-
5	5 Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari	Desa Bobotsari Kec. Bobotsari	20.000.000	20.000.000	-	-
6	6 Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong	Desa Pagerandong Kec. Mrebet	20.000.000	20.000.000	-	-
7	7 Panti Asuhan Yusufiyah Cipawon	Desa Cipawon Kec. Bukateja	20.000.000	20.000.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
8	Panti Asuhan Al Khoerot Majasari	Desa Majasari kec. Bukateja	20.000.000	20.000.000	-	-
9	Panti Asuhan Nurul Huda Karangreja	Desa Karangreja Kec. Kutasari	20.000.000	20.000.000	-	-
10	Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul	Kel.Karangsentul Kec.Padamara	20.000.000	20.000.000	-	-
11	Panti Asuhan Raudlatut Taqwa Penambongan	Kel.Penambongan Kec.Purbalingga	20.000.000	20.000.000	-	-
12	Panti Asuhan Mamba'ul Ikhsan Karangpucung	Desa Karangpucung Kec.Kertanegara	20.000.000	20.000.000	-	-
13	Panti Asuhan Muhammadiyah Palumutan	Desa Palumutan Kecamatan Kemangkon	20.000.000	20.000.000	-	-
14	Panti Asuhan Al Husna Patemon	Desa Patemon Kecamatan Bojongsari	20.000.000	20.000.000	-	-
15	Panti Rehabilitasi Nurul Ikhsan Karangsari	Desa Karangsari Kec.Kalimananah	20.000.000	20.000.000	-	-
16	Panti Rehabilitasi An Nur Bungkanel	Desa Bungkanel Kec.Karanganyar	20.000.000	20.000.000	-	-
17	Panti Wreda Dharma Kasih Kalimantan	Kec.Kalimananah	80.000.000	80.000.000	-	-
18	Panti Asuhan				-	-
<b>5.1</b>	<b>5.03</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat</b>	<b>22.298.500.000</b>	<b>24.713.500.000</b>	<b>2.415.000.000</b>	<b>9,77</b>
<b>5.1</b>	<b>5.03.03</b>	<b>Belanja Beasiswa Kurang Mampu</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	-	-
	1	Beasiswa Miskin	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
		Purbalingga			-	-
<b>5.1</b>	<b>5.03.05</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat</b>	<b>1.778.500.000</b>	<b>1.778.500.000</b>	-	-
	1	Bansos kepada masyarakat	536.500.000	536.500.000	-	-
	2	Bantuan orang dengan kecacatan berat	1.080.000.000	1.080.000.000	-	-
	3	Bansos thalasemia	162.000.000	162.000.000	-	-
		Purbalingga			-	-
<b>5.1</b>	<b>5.03.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	-	-
	1	Bantuan anak yatim piatu	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
		Purbalingga			-	-
<b>5.03.09</b>		<b>Belanja Bantuan Sosial kepada PPCI</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-	-
	1	PPCI	20.000.000	20.000.000	-	-
		Kab.Purbalingga			-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.1.5.03.10	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin		18.000.000.000	18.000.000.000	-	-
1	Bantuan Rehab RTLH	Kab.Purbalingga	18.000.000.000	18.000.000.000	-	-
5.1.5.03.11	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)		-	2.415.000.000	2.415.000.000	-
1	Bantuan PKRS	Kab.Purbalingga	-	2.415.000.000	2.415.000.000	-
<b>JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>			<b>24.698.500.000</b>	<b>27.113.500.000</b>	<b>2.415.000.000</b>	<b>8,91</b>

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal **2 Mei 2019**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR **38**

